

Implementasi *Good dan Clean Governance* dengan Pendekatan Nilai-Nilai Po-Lima pada Pemerintahan Kota Baubau

Junaid Gazalin¹, La Asiri²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Email: junaidgazalin@gmail.com¹, laasiri@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana prinsip tata kelola *clean and good governance* yang merupakan acuan dasar dari penyelenggaraan pemerintahan pendekatan nilai kearifan lokal *Sarapatanguna* dengan konsep PO-Lima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, Untuk memperoleh data yang benar dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data dalam penelitian ini memakai analisis data melalui reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Hasil dalam penelitian ini adalah : 1). Pelaksanaan *good dan clean governance* dengan pendekatan Po-Lima ini di Kota Baubau cukup berhasil mempengaruhi sikap dan kepribadian para aparatur pemerintahan dan publik, 2) Terdapat indikasi relevansi antara implementasi *good governance* dan nilai-nilai PO-Lima yakni : (1). Efektif dan efisien dalam nilai PO-Maamaasiaka (saling menyanyangi), 2). Prinsip transparansi dalam nilai PO-Popiapiara (saling memelihara), 3). Prinsip Orientasi dan bervisi strategis dalam kesepakatan dalam nilai PO-Angkaangkataka (saling mengangkat martabat), 4). Prinsip akuntabilitas dalam nilai PO-Maemaeaka (saling menghargai), 5) Prinsip Keadilan, Partisipasi dan aturan hukum dalam nilai PO-Bhincibhincikuli (mencubit/saling merasakan)

Kata Kunci : *Implementasi good and clean Governance, PO-Lima*

Abstract

This study aims to describe how the principles of clean and good governance which are the basic reference of the governance of the Sarapatanguna local wisdom value approach with the PO-Lima concept. This study uses a descriptive research type with a phenomenological approach. in-depth study and documentation. The data in this study uses data analysis through data reduction, data presentation, conclusions and data verification. The results in this study are: 1). The implementation of good and clean governance with the Po-Lima approach in Baubau City is quite successful in influencing the attitudes and personalities of government officials and the public, 2) There are indications of relevance between the implementation of good governance and the values of PO-Lima, namely: (1). Effective and efficient in the value of PO-Maamaasiaka (mutual love), 2). The principle of transparency in the value of PO- Popiapiara (mutual care), 3). Orientation principle and strategic vision in agreement on the value of PO-Angkaangkataka (elevating each other's dignity), 4). The principle of accountability in the value of PO-Maemaeaka (mutual respect), 5) Principles of Justice, Participation and the rule of law in the value of PO-Bhincibhincikuli (pinch/felt each other)

Keywords: *Implementation of good and clean governance, PO-Lima*

PENDAHULUAN

Konsep penyelenggaraan pemerintahan merujuk pada perjalanan sebuah institusi negara hakikatnya adalah sekelompok orang yang bekerja didalamnya sebagai abdi negara dalam menjalankan pelaksana kebijakan politik negara. Sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab akan pekerjaannya, dengan itu pula setiap kebijakan dan beban pelayanan kepada masyarakat dituntut agar selalu prima, ini sebabkan karena tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada lembaga dan aparatur sipil negara adalah masalah hajat hidup orang banyak, karena kebijakan pelayanan yang diberikan akan berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat.

Kebutuhan akan birokrasi dalam realita kehidupan merupakan konsekuensi dari kehidupan bernegara yang pada prinsipnya masyarakat mempunyai keterkaitan antara penyelenggara negara dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang menjadi masalah adalah bagaimana formulasi implementatifnya, dalam mengembangkan konsep *good governance* baik melihat cara kerja yang tersistematis, terkontrol dari para aparatur yang bekerja dalam birokrasi tersebut.

Dalam realita sehari-hari banyak kita lihat perbuatan amoral penyelenggara pemerintahan baik dari itu lingkup eksekutif, yudikatif maupun legislatif, ini adalah realita bahwa penyelenggaraan pemerintahan sudah kehilangan nilai-nilai moral maupun etika ataupun berdasarkan nilai kebudayaan sebagai identitas.

Berbagai persoalan dialami oleh bangsa Indonesia sekarang ini semakin beragam dan semakin sarat dengan permasalahan dialami bangsa seharusnya oknum aparatur pemerintah yang sejatinya menjadi panutan banyak yang tersandung masalah hukum (Siti Maryam, 2016). Banyaknya pemimpin yang dijadikan teladan walaupun sudah diakui mendapatkan penghargaan anti korupsi tetapi belum menjadi jaminan sikap dan kepribadianya tetap terjaga seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, di Tahun 2017 Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Nurdin Abdullah mendapatkan penghargaan bergensi di bidang anti korupsi Bung Hatta Anti *Corruption Award* (BHACA) (Yunus, 2021). Dengan begitu eksistensi pemerintahan yang baik (*good governance*) yang selama ini dielu-eluhkan, faktanya masih menjadi mimpi dan hanyalah sebagai jargon belaka dalam perjalanan pemerintahan di Indonesia.

Secara historis penerapan *good governance* di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua hal yaitu dalam hal internal dan eksternal. Dalam hal internal, masyarakat menilai krisis yang terjadi yang merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat disebabkan oleh praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang merajalalela pada tiga sendi pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, disebabkan oleh pilar dalam sistem pemerintahan kita ini dapat kita simpulkan bahwa aparatur-aparatur tersebut tidak amanah dalam memikul tanggungjawab kepada publik dalam memberikan pelayanan. Sedangkan dalam sisi eksternal adalah globalisasi adalah karena situasi kondisi objektif perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri.

Istilah *governance* UNDP dalam Sadu Wasistiono menafsirkan *governance* adalah pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan negara di semua tingkatan dan isini memfokuskan pada kekuasaan yang memegang legalitas. (Warjiyati, 2018) Sedangkan menurut Word Bank makna *governance* dimaknai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan mendominasi sumber daya- sumber daya ekonomi dan sosial dan pencegahan korupsi baik secara politik dan admnistras, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Peristiwa yang sangat cepat dan dramatis terjadi dalam skala global. Munculnya konsep “*governance*” adalah salah satu jawaban atas perubahan tersebut. Dalam konsep “Pemerintahan” ini mengalami pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dari

“government” menjadi “governance”, sebagai konsekuensi dari perubahan ini adalah pemerintah tidak lagi memegang monopoli dalam penyelenggaraan negara, tetapi harus berbagi peran baik dengan sektor swasta maupun dengan masyarakat sipil. Perubahan ini juga berimplikasi pada pola hubungan antara pemerintah, swasta dan publik masyarakat menjadi lebih setara dan demokratis. (Haris, 2019)

Menurut kepala Pusat Studi Pancasila UII Prof DR Sudjito, MH, bahwa fenomena dunia politik Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir telah mengalami banyak perubahan. Perubahan politik di Indonesia tidak hanya mengubah karakter dan perilaku politisi, partai politik, elit politik, dan penguasa, tetapi juga mengubah persepsi dan paradigma berpikir masyarakat Indonesia tentang makna hakikat politik itu sendiri. Munculnya konflik antar lembaga negara, kasus korupsi hingga terseretnya penyelenggara negara karena narkoba dan asusila yang duduk di lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. (Gusti, 2013)

Perihal diatas merupakan dasar refleksi atas penyimpangan nilai-nilai luhur dalam penyelenggaraan pemerintahan. inilah menjadi titik balik dalam pemerintahan yang kembali berorientasi pada nilai-nilai luhur budaya bangsa. Implementasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo berdasarkan nilai kebudayaan merupakan salah satu solusi mengatasi kepemimpinan nasional dengan mencanangkan gagasan revolusi mental kepada setiap aparatur negara dan masyarakat Indonesia sebagai motivasi kembali kepada nilai kearifan budaya lokal dan nilai luhur Pancasila yang digali dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia sendiri (Wiridin et al., 2022).

Secara instrumental membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dalam praktiknya dilakukan dengan mengubah cara pandang, pikiran dan perilaku melalui internalisasi nilai esensial pada setiap individu, institusi, sosial masyarakat dan lembaga-lembaga negara. (Publik, 2015) Gagasan revolusi mental pun di setiap daerah mulai diprogramkan dalam pembaharuan jati diri tersebut, salah satunya di Pemerintah Kota Baubau dalam mengembalikan jati diri dasar budaya Buton yang dinamakan *SARAPATANGUNA* yang dikembangkan Walikota Baubau Dr. A.S. Tamrin dalam disertasinya tentang konsep PO-Lima menjadikan penemuan konsep kepemimpinan baru yang sekarang menjadi Semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Baubau. Konsep PO-Lima ini buah hasil elaborasi dan penggalian dari nilai-nilai budaya terdahulu dalam *Sarapatanguna* bagian pertama dalam Undang-Undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton yang terdiri dari empat nilai yaitu *po-maamaasiaka*, *po-piapiara*, *po-maemaeka*, dan *po-angkaangkataka* dengan *falsafah bincibinciki kuli* sebagai *causa primanya* yang mengandung prinsip persamaan, kesetaraan, dan keadilan pada dasarnya adalah sebagai nilai dalam etika kehidupan masyarakat. (Thamrin, A.S, 2019)

Sarapatanguna berasal dari bahasa wolio yang terdiri dari tiga kata yaitu Sara, Pata dan angu. Sara berarti Norma, nilai, aturan hukum atau dapat juga berarti Pemerintah yang memperoleh mandat dari rakyat untuk menjalankan dan menegakan aturan. Patanguna empat buah, macam, unsur, jadi Sarapatanguna dapat diartikan norma, nilai yang empat yang harus, dipatuhi, dipedomani seluruh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berketuhanan (Bagea, 2016)

Secara Substansi, Sarapatanguna mengandung nilai luhur yang dirumuskan oleh para leluhur (*founding Father*) pendiri kesultanan Buton yang diformulasikan menjadi kitab Undang-Undang Dasar Martabat Tujuh Kesultanan Buton. Kedudukan *Sarapatanguna* sebagai pedoman bertingkah laku masyarakat yang merupakan sumber nilai dalam etika kehidupan bermasyarakat khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Mulyadi, 2021)

Konsep PO-5 yaitu *Pomaamasiaka* yang artinya saling menyanyangi dan mencintai. Popiapiara artinya menjaga atau merawat, pegertiannya saling merawat, saling memelihara atau saling mengayomi. Pomaemaeaka artinya malu, artinya saling menanggung malu, jika melakukan perbuatan tercela yang malu bukan hanya yang bersangkutan, tapi seluruh keluarga, orang tua dan masyarakat akan merasa malu juga. Poangka-angkataka, yang artinya saling mengangkat martabatt, saling menghormati, saling menghargai. Pobinci-binci kuli yang artinya saling mencubit berdasarkan filosofi rasa, sudah menjadi harga mati yang harus diterapkan dalam membangun Kota Baubau (Thamrin, 2019). Dalam aktualisasi penerapan *good governance* dalam representasi PO-Lima penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu solusi pendekatan demi terlaksananya clean governance di Pemerintahan Kota

METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah jenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan. (Sugiyono, 2010). Penelitian deskriptif kualitatif menurut Sukmadinata adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik yang alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena lainnya. (Syahartijan et al., 2019)

Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Menurut Bartens mengatakan metode fenomenologi merupakan suatu analisa deskriptif serta instropektif mengenai kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman langsung. Bagi Husserl fenomenologi merupakan kajian filosofis yang melukiskan segala bidang pengalaman manusia. Baginya fenomenologi yang berakar dari keterbukaan subyektif, sebuah pendekatan radikal terhadap sains yang terus dikritisi (Hasbiansyah, 2008).

Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Dalam pandangannya Fenomenologi merupakan apa yang kita ketahui karena itu pernah kita alami. Pandangan dan sikap dalam penelitian yaitu hal yang menjadi satu-satu cara untuk mengetahui pengalaman orang lain adalah dengan menanyakan hal tersebut lewat cara wawancara. Pendekatan fenomenologi mempunyai dimensi yang sangat penting yaitu dalam setiap pengalaman orang yang pernah dialami terdapat sesuatu yang bermakna, penting, dan hakiki. Dari penelitian fenomenologi peneliti harus menggunakan metode dengan pendekatan tanpa asumsi, praduga ataupun konsep. (Denzin, 2009)

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, untuk memperoleh data yang benar dan sah dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam kepada informan kunci dan referensi yang memadai. Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan melalui *guidance interview* wawancara mendalam dan observasi langsung, sedangkan yang data sekunder dikumpulkan melalui analisis pendekatan pelaksanaan nilai budaya *Sarapatanguna*, berupa dokumen, naskah, jurnal dan publikasi dari lembaga terkait

Penelitian ini dilaksanakan pada aparat pemerintah Kota Baubau dan masyarakat. Analisis data dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dimulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian, memakai metode Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Good and clean Governance dengan pendekatan PO-Lima Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Baubau

Pemerintahan secara umum mempunyai tanggungjawab moral dan tanggungjawab hukum. Tanggungjawab moral adalah tanggungjawab atas amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan tanggungjawab hukum adalah tanggungjawab atas diri sendiri, jika melakukan kesalahan maka diri sendiri yang akan menanggung akibatnya. Itulah yang membedakan antara masyarakat dan pemerintahan, aparatur (pemerintahan secara sempit) melekat tanggungjawab yang merupakan konsekuensi dari kedudukannya, yang mempunyai pengaturan sistim kerja makanya disebut mengatur bukan memerintah. Dalam konteks persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kompleksitasnya, norma dan aturan tertulis yang dibuat digunakan sebagai instrumen aparatur pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelayanan masyarakat. Secara substansi pemerintah adalah pelayanan masyarakat, secara logika seorang pelayanan akan lebih mementingkan orang yang dilayani, pemerintahan formil seperti sekarang ini lebih tepatnya disebut mengatur karena konotasi mengatur lebih halus daripada memerintah.

Po-Lima adalah akronim dari nilai-nilai budaya Buton dari *Sarapataanguna* bagian pertama yang diformalkan dalam Kitab Undang-Undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton. Filosofi tersebut mengandung makna masyarakat yang banyak dari dan asal-usul yang berbeda dapat dipersatukan dalam persaudaraan kebangsaan Buton. Pada saat sultan Buton keempat Dayanu Ikhsanudin (La Elangi) menetapkan Undang-Undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton sebagai dasar bernegara

Berdasarkan catatan sejarah aturan Sarapatunguna dikenal memiliki nilai budaya yang nilainya bermakna universal, tidak mengenal perbedaan suku, ras, dan ras agama, politik, kekuasaan ini adalah filosofi hidup dan etika sosial. Untuk komunitas masyarakat buton yang memiliki kesadaran kolektif di masa kejayaan yang lalu yakni adalah kebijaksanaan dalam kearifan lokal *bhinci-bhinciki kuli*. Kebijaksanaan *Bhinci-Bhincikikuli* ini terjabarkan jadi, empat pola perilaku dasar adalah *Pomae-maeka*, *Pomaa-maasiaka*, *Popiapi ara*, *Poangka-angkataka*.

Pendekatan Po-Lima ini di Kota Baubau cukup berhasil mempengaruhi sikap dan kepribadian para aparatur pemerintahan dan publik, implementasi nilai budaya Sarapatunguna baik dalam kepemimpinan Kota Baubau dan masyarakat beberapa halnya meliputi budaya malu melalui ungkapan *Pomaemaeka* artinya malu melakukan hal tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, ungkapan *Popiarapiara* diartikan saling memelihara dengan saling menjaga satu dengan lainnya, budaya saling menyanyangi merupakan arti ungkapan makna dari *Pomamasiaka* dan budaya saling menghargai melalui ungkapan *Poangka-angkata*, sehingga hal ini dalam pemerintahan bisa tercipta suasana harmonis, aman, tentram dan damai sehingga penyelenggaraan good governance bisa tercipta seutuhnya. (Bagea, 2016)

Dalam *Sarapataanguna* bagian pertama kedudukan Bhincibincikikuli sebagai nilai dasarnya, yang kemudian diadopsi dan dielaborasi menjadi lima nilai dalam perwujudan nilai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Baubau. Bahwsanya adopsi dari *Sarapataanguna* yang dikembangkan Bapak Walikota Baubau Dr. A.S, Tamri, MH dalam wawancaranya menjadi jargon sebutan Po-5 bahwasanya Sara itu norma, dalam konteks *Sarakidina* (norma/aturan kecil). *Sara Ogena* (norma/aturan besar/pembuat aturan) itu pemerintah, dalam konteks *Sarawajo Sarakiwali* itu adalah ritual pelaksanaannya.

Untuk itu dengan berbagai pendekatan sala-satunya adalah pendekatan kearifan lokal dapat memberikan solusi untuk kembali pada penyadaran setiap pelaksanaan Pemerintahan. secara umum pemerintah wewenangnya dibatasi agar tidak terjadi penyalagunaan wewenang (*abuse of power*) adalah agar tujuan dari penyelenggaraan dapat berjalan maksimal untuk melayani dan

mensejahterakan masyarakat dikarenakan dalam pemerintahan terdapat fungsi-fungsi kenapa adanya pemerintahan. Akan tetapi kompleksitas persoalan penyelenggaraan pemerintahan tidak serta merta menghindarkan adanya penyalagunaan wewenang, pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat dan sebagainya. KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), penyalagunaan wewenang, pelayanan yang tidak humanis kepada masyarakat, rangkaian permasalahan ini adalah bentuk konkrit dilapangan yang selama ini sering terjadi.

Prinsip hak dan kewajiban dalam konteks pemerintahan, pemerintah berkewajiban melayani masyarakat diakibatkan oleh wewenang yang diberikan sebagai tanggungjawab dan haknya menerima sebagai akibat dari kedudukannya atau kinerjanya. (Warjiyati, 2018) Dari prinsip hak dan kewajiban tersebut yang diusung oleh konsep PO-Lima dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan proses tata kelola pemerintahan dapat mewujudkan *good governance* sebagaimana merupakan fokus penelitian ini pada penyelenggaraan pemerintahan kota Baubau yang penulis himpun berdasarkan hasil wawancara mengenai prinsip-prinsip *good governance*.(Lauma et al., 2019) Berdasarkan wawancara dengan para narasumber mengenai implementasi *good governance* dengan pendekatan Po-Lima dalam pada kegiatan pemerintahan kota Baubau yakni :

Prinsip Efektif dan Efisien dan Daya Tanggap dalam nilai Po-Maamaasiaka (saling menyanangi)

Aspek efektif dan efisien menekankan setiap kegiatan apapun dalam kerja-kerja pegawai, prinsipnya harus terukur sesuai dengan yang ditetapkan serta membawa manfaat yang sebaik-baiknya. Dengan aspek daya tanggap juga dalam perjalanan pendekatan Po-Lima ini implementasinya sudah dilakukan, upaya-upaya Aparatur Sipil Negara selalu tanggap terdaya setiap persoalan. pertama soal pelayanan, kemudian kedisiplinan, kedisiplinan ini kan banyak, secara universal, kemudian relasi antara bawahan dan pimpinan itu itu juga dijalankan itu juga terutamawalaupun secara individual kebaikan dalam PO lima tersebut belum sepenuhnya dilakukan para aparatur sebagai contoh ;

1. Untuk menciptakan clean dan good governance maka implementasi di unit kerja ini soal efektif dan efisiensi dalam pelayanan artinya mencoba dengan secara tulus ikhlas dengan bersandar pada Po-Lima itu untuk melayani orang dengan sebaik baiknya,dengan melihat sisi penghargaan terhadap orang yang dilayani,
2. Indikator daya tanggap di dalam keseharian pekerjaan dikantor tersebut adanya suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) yang tepat kepada setiap orang yang dilayani seperi mengarahkan dan membujuk, melayani dengan nilai saling

Prinsip Transparansi dalam nilai PO- Popiapiara (saling menjaga)

Aspek transparansi mengedepankan setiap proses tata kelola pemerintahan mengedepan transparansi kinerja pemerintahan serta kebebasan arus informasi kepada masyarakat. Dengan pendekatan nilai PO- angkaangkataka maka prinsip transparansi selalu diawali dengan kejujuran dengan tindakan keterbukaan baik dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, sesama tim kerja ASN agar dalam melaksanakan tugas di dalam lingkup selalu menamakan nilai-nilai PO-Lima sehingga akan jauh dari kekisruan dan kesalahpahaman satu sama lain.

Prinsip Orientasi dalam Kesepakatan dan Bervisi Strategis dalam nilai PO-Angkaangkataka (saling mengangkat martabat)

Aspek ini pimpinan harus peka terhadap pendapat atau aspirasi bawahan, dengan pendekatan nilai kearifan lokal ini bernilai jika pemimpin atau sesama staf memperlakukan teman sejawat

sebagai bagian dari keluarga ukan sebagai musuh sehingga dalam bekerja memberikan sisi kemanusiaan tinggi dengan saling memberi suport atau semangat dengan menghormati hasil kerjanya. Seorang pemimpin dan aparatur di Pemerintahan harus mempunyai sudut pandang yang luas jika derajat ilmu dan moral lebih diutamakan sehingga saling memberi rasa nyaman dan penghargaan dalam bekerja.

Prinsip akuntabilitas dalam nilai *PO-Maemaeka* (saling menghargai)

Aspek ini pada prinsipnya dalam kegiatan sistem kerja pemerintahan selalu diarahkan agar aparatur pemerintahan selalu dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pekerjaannya. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan diri dalam hal lain yang tidak sesuai dengan tujuan kantornya bekerja. bagaimana upaya kedisiplinan aparatur kemudian diperlakukan antara atasan dan bawahan maka dengan pendekatan sifat Po-lima, sebagai pimpinan harus merasa malu jika bawahan kedisiplinanya tinggi, maka untuk itu pimpinan juga harus lebih kedislinanya, sebaliknya jika kita menyanyangi bawahan maka begitu juga bawahan akan menyukai pimpinan. Memperlakukan bawahan atau sesama staf secara adil dalam penyelenggaraan pemerntahan dan pelayanan publik. Penerapan PO-Lima dalam pendekatan konsep PO-maemeka ini, menjelaskan bahwa dalam diri setiap pegawai harus menyelesaikan pekerjaan uang sudah diamanahkan kepada seseorang jika hal tersebut tidak dilakukan tanggung jawab sia-sia dan merasa malu dan kedepanya tidak lagi dihargai. Untuk itu dengan konsep PO-maemaeka ini setaip pekerjaannya.

Prinsip Keadilan, Prinsip Partisipasi dan aturan hukum dalam nilai *PO-Bhincibhincikuli* (mencubit/saling merasakan)

Aspek keadilan dan aturan hukum menekankan dalam penyelenggaraan pemerintahan setiap masyarakat dan aparat sama kedudukannya dalam hukum artian tidak ada adanya diskriminasi atau membeda-bedakan masyarakat baik individu maupun kelompok. Aspek Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan good governance dapat berupa partisipasi masyarakat dengan menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dan pelaksanaan aturan semua sama dihadapan hukum.

Penerapan dengan konsep PO 5, *PO Binci-binciki Kuli*, mengandung makan saling mencubit kulit suatu ungkapan kiasan atau perbuatan yang menyakitkan orang lain akan sama halnya dengan ketika kita disakiti. Jika kita cubit kulit kita akan terasa sakit tentu kita tidak suka begitupun orang lain, jika kita tidak suka disakiti maka jangan pula menyakiti orang lain, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan para aparatur munncul sifat rendah diri dan tidak sombong dengan apa yang dimiliki.

Berdasarkan wawancara diatas secara keseluruhan diketahui bahwa PO-Lima dalam penyenggaraan pemerintahan kota Baubau implementasinya sejauh ini hanya sebagai patokan nilai atau sprit dalam melakukan kerja-kerja pemerintahan sebagaimana fungsi dalam pemerintahan dalam mewujudkan *good governance*. Implementasi yang dilakukan sejauh ini hanya berupa gambar-gambar pada beberapa kantor pemerintahan serta upaya-upaya dalam rapat internal unit kerja untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai PO-Lima dalam kegiatan pemerintahan. Namun ditemukan indikasi dari wawancara tersebut relevansi antara prinsip good governance dan nilai Po-Lima yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 Relevansi PO-Lima dengan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan kota Baubau

NO	PRINSIP GOOD GOVERNANCE	NILAI PO-LIMA	INDIKATOR
1.	Prinsip Efektif dan Efisien dan Daya Tanggap	PO-Maamaasiaka	<ul style="list-style-type: none"> a) Pemerintahan yang tulus dan ikhlas melayani masyarakat dengan rasa sayang antara pelayan dan dilayani secara timbal balik dalam keadaan seimbang, b) Mengedepankan kedisiplinan dalam bekerja, profesional sesuai dengan tugasnya, c) Prioritas koordinasi organisasi atau unit kerja dalam mewujudkan tujuan organisasi sebagai pelayan masyarakat, d) Pemimpin telah mampu bersimpati, memberikan empati, melihat keadaan bawahan serta rakyatnya jika ditimpa suatu persoalan e) Pekerjaan sesuai dengan harapan atau yang direncanakan serta f) Mewujudkan terpeliharanya iklim organisasi yang harmonis antar pegawai atau atasan sehingga terjadi kekompakan dalam bekerja.
2.	Transparansi	PO-Popiarapiara	<ul style="list-style-type: none"> a) Kegiatan pelayanan yang membawa kemanfaatan bagi aparat dan masyarakat, b) Membuka diri dalam kemudahan memperoleh informasi publik sehingga mudah diakses masyarakat c) Terwujudnya kebersamaan, persatuan, saling menjaga nama baik organisasi serta nama baik pimpinan d) Membangun kejujuran dengan tindakan keterbukaan baik dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, sesama tim kerja.
3.	Prinsip Orientasi dalam Kesepakatan dan Bervisi Strategis	PO-Angkaangkataka	<ul style="list-style-type: none"> a) Saling menghargai satu sama lainnya antara sesama aparatur dan masyarakat yang dilayani b) Mengedepankan sikap penghargaan kepada sesama pegawai ataupun masyarakat sebagai penerima layanan, c) Mengedepankan kolektivitas antar pegawai agar terhindar dari kekisruhan atau kesalahpahaman dalam bekerja, sehingga bersama-sama mencapai inpiian dengan strategi membawa nilai kebaikan organisasi. d) Mewujudkan cita-cita bersama dalam kerja sama dalam organisasi
4.	Akuntabilitas	PO-Maemaeka	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengedepankan rasa tanggung jawab dengan moralitas yang kuat.

			b) Memiliki rasa malu atau rasa takut jika melanggar peraturan yang ada dalam organisasi dan lingkungan masyarakat
5	Prinsip Keadilan, Prinsip Partisipasi dan aturan hukum	PO- Bhincibhincikuli	a) Pelayanan yang mengedepankan persamaan kedudukan didepan hukum, b) Selalu menanggapi keluhan-keluhan masyarakat dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan pekerjaan dalam pelayanan yang dilakukan sebaik mungkin. c) Memberikan ruang kreatifitas dalam bekerja bagi para aparatur d) Dalam setiap kepemimpinan tugas pemimpin merasa malu jika melanggar, saling takut jika berbuat kesalahan, saling segan terhadap kebaikan seseorang serta saling insaf atas perbuatan yang keliru dan salah.

Dari hal tersebut diatas maka pelaksanaan *good dan clean governance* akan tercapai terus menerus dengan pendekatan kearifan lokal dalam nilai Po-lima dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya nilai tersebut sedangkan dalam pemerintahan dibuatkan regulasi berupa petunjuk atau semacam himbauan dan instruksi pimpinan dalam pelaksanaan organisasi. Sedangkan di Sekolah diajarkan dalam materi muatan lokal agar bisa dipahami bagaimana pesan budaya tersebut. (Thamrin, 2019).

Pelaksanaan PO-Lima dalam Pemerintahan

Pemerintahan secara umum mempunyai tanggungjawab moral dan tanggungjawab hukum. Tanggungjawab moral adalah tanggungjawab atas amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan tanggungjawab hukum adalah tanggungjawab atas diri sendiri, jika melakukan kesalahan maka diri sendiri yang akan menanggung akibatnya. Itulah yang membedakan antara masyarakat dan pemerintahan, aparatur (pemerintahan secara sempit) melekat tanggungjawab yang merupakan konsekuensi dari kedudukannya, yang mempunyai pengaturan sistim kerja makanya disebut mengatur bukan memerintah.

Pada tahun 2021, walikota Baubau H.A.S Tamrin melaunching Aplikasi SI-POLIMA sekaligus pembentukan sosialiasi tim PO-Lima pada lingkup pemerintahan Kota Baubau, ini adalah bentuk kebijakan guna mengingatkan kembali tentang bekerjanya aparatur dengan nilai luhur (*founding father*) Buton terdahulu guna aparatur-aparatur pemerintahan kota Baubau dapat menerjemahkan kembali PO-Lima dalam bentuk kerja-kerja pemerintahan berdasarkan nilai luhur tersebut. Aplikasi ini adalah sala satu inovasi yang digunakan para pegawai untuk bisa bertindak dan bekerja dengan nilai kejujuran, transparansi, akuntabel sesuai dengan tercapainya *good governance*. Disisi lain Walikota dalam pembentukan panitia tim sosialisasi Sarapatanguna disejumlah sekolah, dimana disetiap ruangan sekolah dilukiskan prinsip dan nilai kearifan lokal sehingga bisa tersosialisasi dengan baik. *Regulasi* sangat perlu tujuannya untuk memfilter pengaruh dari luar yang hendak merusak tatanan kehidupn yang ada sekarang. Langkah implementasi nilai Sarapatanguna tersebut melalui pelaksanaan sosialisasi, membuat kebijakan dan proses penyadaran.(Hardiman, 2017)

Dari hasil kesimpulan wawancara Walikota Baubau H. AS. Tamrin bahwa penerapan *good dan clean governance* dapat tercapai jika jiwa (Pomamasiaka) saling mengasihi, Popiarapiara saling menghormati dan menghargai, Poangkaangkata (saling memberi semangat dan mengangkat derajat serta Pomaemaeyaka (saling merasa malu jika berbuat kesalahan atau melanggar. Untuk itu harus ada sinergi dengan aparatur dan masyarakat untuk membangkitkan kesadaran mulai dari level pemimpin untuk menerapkan nilai Sarapatanguna dengan memberi contoh tauladan. Jika ada seorang aparatur melakukan tindakan melanggar hukum maka seluruh aparatur tersebut merasa malu karena mereka juga aparat pemerintahan bekerja ditempat yang sama.

Untuk menguatkan penerapan *good dan clean governance* itu Pemerintah Kota Baubau membuat sala-satu inovasi yang dibuat yaitu berbentuk aplikasi elektronik mengukur tingkat kinerja aparatur. Walikota Baubau H. AS. Tamrin pada tanggal 4 januari 2021 telah *melaunching* dan memaparkan aplikasi SI POLIMA yang digunakan terdiri dari 3 pokok penting yakni, pertama, sistem absensi kepegawaian berbasis android; kedua sistem pengimputan aktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis android dan ketiga ialah sistem validasi pekerjaan pimpinan unit kerja juga berbasis android. (Razak, 2021)

Nilai-nilai dari dari leluhur tersebut dihayati kemudian diimplementasikan dalam bentuk kerja pemerintahan guna mencapai tujuan organisasi adalah merupakan tahapan penting dalam kegiatan pemerintahan. Penerapan konsep *Good Governance* dan konsep PO-Lima membawa misi sebagai nilai kinerja dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, nilai yang digunakan sebagai hubungan kesesama manusia.

Bahwasanya implementasi nilai PO-Lima sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang menitikberatkan pada hubungan kesesama manusia yang adanya timbal balik adalah bangunan konsep dari PO-Lima ini yang ingin diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan bahwa PO-Lima ini digunakan sebagai spirit kerja aparatur pemerintah kota Baubau dalam implementasi bertumpu pada hak dan kewajiban seperti halnya waktu pengajian dengan jangan menunda hak seseorang apalagi di *mark up* atau dipotong harusnya ketika memahami nilai nilai ini maka didalamnya dilandasi kejujuran dan kesadaran masing-masing pemimpin maupun aparaturnya.

PO-Lima itu menjadi rujukan dalam arti aspek nilai sikap dan tindakan bahwa apapun yang kita lakukan dengan nilai PO-Lima itu, menjadi panduan moral tetapi tetap sesuai dengan petunjuk juknis yang ada dalam melakukan operasional kegiatan. Dalam fase seperti ini kembali bagaimana nilai-nilai, moral ataupun etika pejabat publik dapat dijunjung dengan baik. Pemerintah mempunyai nilai etis untuk dapat menunjukkan kinerjanya agar dapat diterima masyarakat, kinerja bukan hanya aspek fisik melainkan juga pada aspek nonfisik, dalam hal ini pada kegiatan pemerintahan disebut sebagai etika pemerintahan. PO-Lima diarahkan pada pembangunan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan yang diarahkan pada aspek kemanusiaan (nonfisik) tidaklah mudah seperti yang dibayangkan akan tetapi ini adalah bentuk upaya pemerintah kota Baubau dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan menanamkan nilai-nilai luhur budaya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan tersebut, diketahui bahwa sejauh ini implementasi *Good dan clean governance* dengan pendekatan Po-Lima pada penyelenggaraan pemerintahann kota Baubau cukup berhasil mempengaruhi aparat dan masyarakat, bentuk implementasi yang dilakukan Aparatur adalah dengan membentuk tim sosialisasi Po-lima dan aplikasi si Polima tentang mengukur kinerja aparaturnya.

Upaya dalam pelaksanaan *good dan clean governance* diingatkan selalu tentang nilai-nilai PO-Lima. Namun penelitian ini menemukan indikasi relevansi antara *good governance* dan nilai Po-Lima yakni dalam (1). Efektif dan efisien dalam nilai PO-Maamaasiaka (saling menyanangi), 2). Prinsip transparansi dalam nilai PO- Popiapiara (saling memelihara), 3). Prinsip Orientasi dan bervisi strategis dalam kesepakatan dalam nilai PO-Angkaangkataka (saling mengangkat martabat), 4). Prinsip akuntabilitas dalam nilai PO-Maemaeka (saling menghargai), 5) Prinsip Keadilan, Partisipasi dan aturan hukum dalam nilai PO-Bhincibhincikuli (mencubit/saling merasakan).

DAFTAR PUSTAKA

- Bagea, ishak. (2016). IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA SARAPATANGUNA DALAM KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DI KOTA BAUBAU, PROVINSI SULAWESI TENGGARA (The Implementation of Culture Values of Sarapatanguna in Government Leadership in Baubau City, Southeast of Sulawesi). *Jurnal K a n d a I*, 12(2), 297–308.
- Denzin, N. K. dan Y. S. L. ed. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (Dariyatno. et.all (ed.); 1st ed.). Pustaka Pelayar.
- Gusti. (2013). *Penyelenggara Negara Cenderung Abaikan Moral dan Etika Politik*. www.ugm.ac.id/Id/Berita/7756. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/7756-penyelenggara-negara-cenderung-abaikan-moral-dan-etika-politik>
- Hardiman, Y. (2017). Implementasi Sara Pataanguna Dalam Sistem Pemerintahan di Kota Baubau. In baubaupost.com/. [implementasi-sara-pataanguna.html](http://baubaupost.com/implementation-sara-pataanguna.html)
- Haris, S. (2019). GOVERNANCE : PERUBAHAN PARADIGMA PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. *Jurnal SOSFILKOM.*, XIII, 33–47.
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(1), 163–180. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>
- Lauma, R., Pangemanan, S., & Sampe, S. (2019). PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3), 1–9.
- Mulyadi. (2021). *PO-Lima dalam Pembangunan*. [Http://Butonrayanews.Co.Id/](http://Butonrayanews.Co.Id/). <http://butonrayanews.co.id/index.php/daerah/buton-raya/bau-bau/item/2684-as-tamrin-pembangunan-di-baubau-berhasil-karena-po-5>
- Publik, D. informasi dan komunikasi. (2015). Government Public Relations Report (Revolusi Mental Bangsa). In *Jurnal Saintifika Islamica* (Vol. 2, Issue 1).
- Razak. (2021). LAUNCHING APLIKASI SI POLIMA, AS TAMRIN KEMBALI TEKANKAN PENTINGNYA NILAI-NILAI PO-5. [Https://Portal.Baubaukota.Go.Id/](https://Portal.Baubaukota.Go.Id/). https://portal.baubaukota.go.id/index.php?mod=berita_detail&id=20210105-054634launching-aplikasi-si-polima-as-tamrin-kembali-tekankan-pentingnya-nilainilai-po5
- Siti Maryam, N. (2016). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, V, 1–10.
- Sugiyono, D. P. (2010). *Metode Penelitian Administrasi* (XVIII). Penerbit Alfabeta Bandung.
- Syahrtijan, L. O. M., Suaib, E., Bahtiar, B., & Husain, M. N. (2019). Jaringan Kepemimpinan Elit Politik Dalam Transformasi Nilai – Nilai Budaya Kesultanan Buton Sarapataanguna Di Masyarakat Agraris Kabupaten Buton. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 8(3), 262–278. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v8i3.817>
- Thamrin, A.S, E. al. (2019). *Polima, Gema Pancasila dari Baubau*. (1st ed.). PT Indomedia Global Mandiri, Jakarta.
- Thamrin, A. . (2019). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Nilai-Nilai Budaya Sarapatanguna dan kepemimpinan Pemerintahan Terhadap Pembangunan di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara* (1st ed.). Indomedia Jakarta.

- Warjiyati, S. (2018). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, 64, 1–10.
- Wiridin, D., Gelong, H. R., Salam, S., & ... (2022). Polima Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu ...*, 3(1), 1–12.
<https://ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/hukum/article/view/549>
- Yunus, M. (2021, February). Nurdin Abdullah Ditangkap KPK, Peraih Bung Hatta Anti Corruption Award. <https://sulsel.suara.com/>, 1–2.
<https://sulsel.suara.com/read/2021/02/27/103141/nurdin-abdullah-ditangkap-kpk-peraih-bung-hatta-anti-corruption-award?page=all>